

MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Renny Mayasari, Shopiana, dan Toni Julham

Mahasiswa Program Magister Manajemen Pendidikan Islam

FITK UIN-Sumatera Utara Medan

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate – Medan, Sumatera Utara

e-mail: rennymayasari@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manajemen keuangan dan pembiayaan dalam pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode tematik (*maudu'iy*) dan teknik literatur yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh, dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam pendidikan uang memainkan peran dalam tiga area; *pertama*, ekonomi pendidikan dalam kaitannya dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan; *kedua*, keuangan sekolah kaitannya dengan kebijakan sekolah untuk menerjemahkan uang terhadap layanan kepada peserta didik; dan *ketiga*, pajak administrasi bisnis sekolah yang harus diorganisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan. Untuk itu, prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan yang harus diterapkan meliputi transparansi, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan keadilan. Biaya (dana) pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tak langsung. Dalam hal menghimpun dana (*raising funds*), pada dasarnya dapat digali dari dua sumber, yaitu dari lembaga sendiri (*intern*) dan melalui pihak luar (*ekstern*) seperti: pemerintah dan masyarakat, wakaf, zakat, dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Kata Kunci: Manajemen, Keuangan dan Pembiayaan

PENDAHULUAN

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Segala proses harus diikuti dengan baik, tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Arah pekerjaan yang jelas dan landasan yang mantab serta cara-cara mendapatkannya yang transparan akan menjadikan amal perbuatan yang mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Swt. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Sesuai dengan prinsip itu, maka manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Untuk memperoleh petunjuk diperlukan adanya pengkajian terhadap al quran dan hadist, sehingga kaum muslimin benar-benar bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari isi kandungan al quran tersebut yang di dalamnya kompleks membahas permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang belum terjadi. Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk permasalahan perencanaan mulai dari asal kejadian manusia, sampai pada aktivitas yang dilakukan manusia semua tertulis di dalam al quran dan hadist.

Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah sampai perguruan tinggi merupakan entitas organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan dan membutuhkan uang (*money*) untuk menggerakkan semua sumber daya (*resource*) yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan.

Manajemen sebagai suatu disiplin ilmu yang secara singkat diartikan sebagai proses untuk mewujudkan tujuan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan madrasah/sekolah. Mengingat pentingnya peran pembiayaan dan keuangan dalam proses pembelajaran, maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola keuangan ini disebut sebagai manajemen pembiayaan/keuangan. Keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Manajemen keuangan juga merupakan kegiatan mengelola dana untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien.

Pembiayaan Pendidikan merupakan salah satu kajian dalam administrasi pendidikan yang membicarakan bagaimana sumber biaya itu diperoleh dan bagaimana menggunakan biaya pendidikan yang diperoleh serta pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana tersebut (Hidayat dan Candra Wijaya, 2017: 109). Oleh sebab itu, keuangan atau pembiayaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan menjadi faktor esensial. Penanggung jawab manajemen pembiayaan pendidikan adalah Kepala sekolah. Dan guru diharapkan dapat merencanakan pembiayaan kegiatan belajar mengajar dengan baik.

Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di tingkat pendidikan dasar misalnya, sekalipun pemerintah telah memberi dana bantuan operasional sekolah (BOS), namun anggapan oleh sebagian besar masyarakat menengah ke bawah masih belum mampu memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orang tua/wali peserta didik. Terlebih bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau disebabkan oleh karena hal yang lainnya.

Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program. Pemerintah dalam hal ini memegang peranan yang esensial demi terciptanya situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4, ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2003) bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Kata diskriminatif di sini berlaku untuk pembiayaan pendidikan, artinya bahwa pembiayaan pendidikan haruslah tidak mendiskriminatifkan setiap warga negara yang memiliki keinginan untuk dapat mengikuti pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dirinya.

PEMBAHASAN

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui menetapkan dan memperoleh sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban.

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan. (Mulyasa, 2006: 194).

Secara umum, manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian. Ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (*budgeting*), Pelaksanaan (*Akunting*) dan tahap penilaian atau evaluasi (*Auditing*).

1. Penganggaran (*budgeting*)

Penganggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu (Fatah, 2000: 47). Dalam menentukan biaya satuan pendidikan terdapat dua pendekatan

yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya dimana menggunakan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid.

2. Pelaksanaan (*Akunting*)

Kata akuntansi (*Akunting*) berasal dari bahasa Inggris *to account* yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Menurut Mulyasa, pelaksanaan keuangan sekolah dapat dikelompokkan dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

3. Evaluasi (*Auditing*)

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi keuangan sekolah, pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan berbasis sekolah. Dalam keuangan manajemen sekolah, kepala sekolah perlu melakukan pengendalian pengeluaran keuangan sekolah selaras dengan anggaran anggaran belanja yang telah ditetapkan (Mulyasa, 2006: 205). Menurut Nanang Fattah secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu memantau (*monitoring*), menilai dan melaporkan.

Manajemen Pembiayaan

Biaya adalah suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi mencapai tujuannya. Di samping itu Mulyadi mengelompokkan konsep biaya dalam arti sempit yaitu sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktivitas. Sedangkan dalam arti luas biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu (Arwildayanto, 2017: 50).

Biaya pendidikan diartikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana

ruang belajar, perbaikan ruang belajar, pengadaan parobot/mebeler, pengadaan alat-alat pelajaran, pengadaan buku-buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pembinaan pendidikan serta ketatausahaan sekolah (Fattah, 2000: 112). Secara teoritis, konsep biaya di bidang lain mempunyai kesamaan dengan bidang pendidikan, yaitu lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang lulusan.

Dana (uang) memainkan peran dalam pendidikan dalam tiga area; *pertama*, ekonomi pendidikan dalam kaitannya dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan; *kedua*, keuangan sekolah kaitannya dengan kebijakan sekolah untuk menerjemahkan uang terhadap layanan kepada peserta didik; dan *ketiga*, pajak administrasi bisnis sekolah yang harus diorganisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan. Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin tak terhingga.

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil (*out put*) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisis biaya satuan (*unit cost*) per siswa. Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah (*Enrollment*) dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan per siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

1. Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan

Menurut Nanang Fattah, biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa itu sendiri.

Sedangkan biaya tidak langsung adalah berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan siswa selama belajar. Biaya tidak langsung (*indirect cost*) berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga anak atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Misalnya ongkos angkutan.

2. Sumber-sumber Biaya Pendidikan

Dalam hal menghimpun dana (*raising funds*), pada dasarnya dapat digali dari dua sumber, yaitu dari dalam lembaga sendiri (*intern*) dan melalui pihak luar (*ekstern*). Di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah dan masyarakat; sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arwildayanto, 2017: 54).
- b. Wakaf, berasal dari amal dengan cara memanfaatkan harta, dan harus dikekalkan, atau yang digunakan adalah hasil harta itu, tetapi asalnya tetap. Wakaf merupakan sumbangan yang digunakan untuk membangun dan merawat tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan da'i, mempersiapkan kebutuhan kaum muslimin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah (Romayulis, 2008: 293).
- c. Zakat, harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga pendidikan islam. Selain zakat ada pula saluran infak yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminology syariat infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan islam. Infak dikeluarkan setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. (Hidayat dan Candra Wijaya, 2017: 127).
- d. Sumber dana lain yang tidak mengikat. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2012 tentang pengutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 12 ayat (1) masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan dasar yang didirikan masyarakat, serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar, (2) Satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan, (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan (Mastitou, 2017:2). Menurut Ramayulis sumber dana bagi lembaga pendidikan islam bisa berasal dari sumber lainnya, baik sumber intern maupun sumber ekstern. Sumber dana yang bersifat intern ini bisa diperoleh dari pembentukan badan usaha atau wirausaha, membentuk lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) maupun dengan melakukan promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang bisa menunjang dana kegiatan. Sedangkan sumber dana yang bersifat internal bisa diperoleh dari donatur tetap ataupun bantuan.

Prinsip Manajemen Keuangan dan Pembiayaan

Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. (Arwildayanto, 2017: 8-9).

1. **Transparansi**, berarti adanya keterbukaan. Di lembaga pendidikan, manajemen keuangan yang transparan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
2. **Akuntabilitas**, dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

3. Efektivitas, lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Efisiensi, perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.
5. Keadilan (*Equilibrium/keseimbangan*), menuntut terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat. Dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat. (Hidayat dan Candra Wijaya, 2017: 112).

Tujuan Manajemen Keuangan dan Pembiayaan

Dalam pelaksanaan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan, di antaranya tahap perencanaan keuangan (*financial plan*), penganggaran (*budgeting*), pelaksanaan pembukuan (*accounting*) dan tahap penilaian atau *auditing*. (Arwildayanto, 2017: 7).

Adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh, dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Di sinilah peran kepala sekolah untuk mengelola keuangan dengan sebaik mungkin dengan memperdayakan sumber daya manusia yang ada. Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah untuk; 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah; 2) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah; 3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Selanjutnya fungsi manajemen keuangan dalam pendidikan adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen (Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2009: 92).

METODE PENELITIAN

Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode tematik (*maudu'iy*), yakni menghimpun ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang manajemen keuangan dan pembiayaan. Selanjutnya untuk mengungkap makna-makna serta simbol-simbol dalam ayat-ayat alquran tentang rumusan manajemen keuangan dan pembiayaan, penulis menggunakan pendekatan *linguistik, semiotik, hermeneutik* dan psikologi.

Secara umum, metode tematik (*maudu'i*) mengambil dua bentuk. *Pertama*, penafsiran menyangkut satu surat dalam Alquran dengan menjelaskan tujuannya secara umum dan khusus, serta hubungan persoalan yang beragam dalam surat tersebut satu dengan lainnya. Dengan demikian, persoalan tersebut saling berkaitan bagaikan satu persoalan saja. *Kedua*, menghimpun ayat-ayat Alquran yang membahas masalah tertentu dari berbagai surat Alquran dan sedapat mungkin diurutkan sesuai dengan masa turunnya, sambil memperhatikan sebab turunnya dan menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasannya (Shihab, 1994: 117).

Sumber data penelitian ini berupa data tertulis baik primer maupun sekunder. Data primer adalah ayat-ayat alquran dan Tafsir *Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder adalah jurnal, buku, dan artikel yang memiliki relevansi dan signifikansi dengan topik penelitian, sehingga akan ditemukan pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang konsep manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *literatur* yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara: *Editing* (pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain), *Organizing* (menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan), dan *penemuan hasil penelitian* (analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan (inferensi) yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah)

Sedangkan untuk analisis, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan (inferensi) yang dapat ditiru (*replicabel*) dan dengan data yang *valid*, dengan memperhatikan konteksnya. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis seluruh pembahasan mengenai manajemen keuangan dan pembiayaan menurut pemikiran M. Quraish Shihab secara lebih mendalam dan menggali makna

Istilah infak dimasyarakat biasanya dikaitkan dengan sedekah atau sumbangan. Namun istilah infak dalam bahasa arab bermakna sangat umum yang berkisar pada mengeluarkan harta untuk keperluan tertentu. Sedekah dapat berupa apapun yang meringankan beban orang lain, apapun yang dilakukan untuk membantu orang lain.

Infak adalah pemberian sesuatu untuk diberikan kepada oranglain yang membutuhkan, tanpa imbalan dengan niat semata-mata mengharap ridha Allah. Ada 2 macam jenis infak yaitu infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib adalah nafkah kepada istri dan anak ataupun biasa disebut dalam bentuk zakat. Sedangkan infak sunnah identik dengan sedekah sunnah. (Yunasril Ali, 2012: 399).

Adapun ayat yang membahas mengenai infak dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah ayat 195, yang berbunyi:



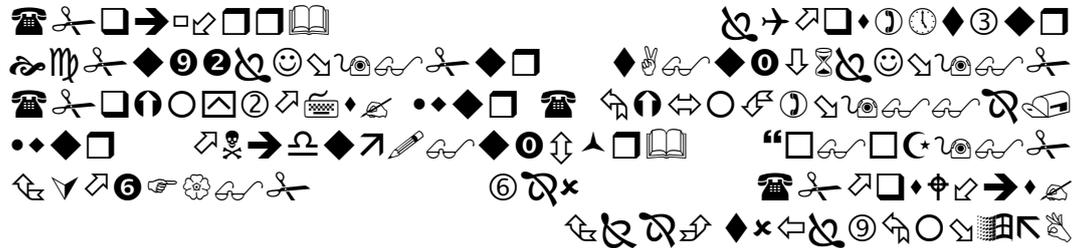
Artinya: “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)

Al-quran seolah menekankan bahwa menafkahkan harta harus disertai dengan ihsan. Ihsan bukan sekedar baik tetapi lakukanlah sebaik mungkin “*seakan-akan engkau melihat Allah ketika melakukannya atau yakin Allah melihatmu secara langsung ketika melakukannya*”. Jadi, berdasarkan Al quran dan Hadist kita memang harus berjuang untuk mampu membelanjakan harta secara ihsan di jalan Allah termasuk didalamnya infak yang akan membantu meringankan beban bagi orang yang tidak mampu untuk menghadapi pembiayaan pendidikan.

3. Surah Hud Ayat 85 dan Surah Asy-Syuara Ayat 181-184 Tentang Keadilan

Yang dimaksud dengan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang berarti memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Sementara keadilan merupakan prinsip dasar dalam islam. Keadilan bukan hanya berlaku ketika memutuskan suatu hukum atas tindakan yang keliru dan melanggar nilai kemanusiaan dan prinsip moral. Keadilan juga harus ditegakkan dalam hal transaksi dalam menakar barang tanpa melakukan kecurangan. Kecurangan dalam timbangan, apabila dilakukan terkait dengan proyek pembangunan fisik seperti gedung, jalan dan bangunan lainnya tidak saja menimbulkan cacat moral bagi

pelakunya tetapi juga menimbulkan kerusakan disuatu tempat bahkan secara global akan merusak bumi yang bisa mengancam keselamatan banyak orang.



Artinya: dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Huud: 85)

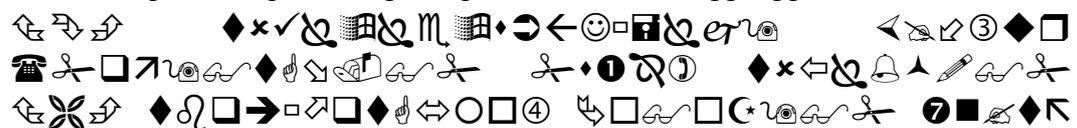
Al-Ghazali berpendapat bahwa keadilan tidak sama dengan kesenangan atau memberi manfaat. Jika seseorang memberikan makanan kepada para hartawan dan pedang kepada para ulama, boleh jadi itu akan menyenangkan penerimanya. Namun tidak adil karena memberikan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Demikian keadilan Allah belum tentu sejalan dengan kesenangan maupun manfaat pribadi dari sudut pandang yang sempit.

Perilaku adil tidak hanya diterapkan dalam kehidupan sosial melainkan dalam lingkungan pendidikan juga. Dalam hal ini hubungan antara keadilan dengan konsep keuangan dan pembiayaan pendidikan adalah untuk menghindari sifat dzolim bagi para pelaku atau pelaksana yang berkaitan dengan keuangan dan pembiayaan pendidikan. Adapun stakeholder yang memiliki dana yang berasal dari beberapa sumber, maka para pelaksana diwajibkan untuk merealisasikan pembiayaan sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan. Sehingga seluruh warga pendidikan mampu menikmati hasil dari nilai yang dikeluarkan.

Adanya fasilitas dalam pendidikan juga salah satu dari faktor keadilan dimana setiap pendidik ataupun peserta didik wajib mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Maka dengan ini para pemimpin diwajibkan agar mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan melaksanakan prinsip keadilan untuk menghindari tindak kecurangan.

4. Surah Mutaffifin Ayat 1-6 Tentang Kecurangan

Sering disaksikan dalam kehidupan sehari-hari seperti mengurangi timbangan, menaikkan harga secara manipulasi, riba ataupun menimbun barang kebutuhan pokok dapat merugikan pihak lain dan mengganggu sistem ekonomi.



sebagainya. Masalah-masalah tersebut harus mendapatkan perhatian, khususnya dari pemerintah dan komite sekolah, sehingga tidak menghambat dan merugikan banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Yunasril. 2012. *Rahasia dan Makna Ibadah*. Jakarta: Zaman.
- Arwildayanto, dkk. 2017. *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga.
- Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, Rahmat dan Candra Wijaya. 2017. *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, Medan: LPPPI.
- Jusuf, Kadarman. 1992. *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mastitou. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu*. (Jurnal ANSIRU PAI V o 1. 1 N o. 2. Juli - Des 2017).
- Mulyasa, E. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ni'mah, Bidayatun. 2009. *Skripsi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Romayulis. 2008. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2009. *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.